



**Judul** : Desak kemendikbudristek PSI Minta Kesejahteraan Guru dan Dosen di Jamin  
**Tanggal** : Kamis, 29 September 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Desak Kemendikbudristek PSI Minta Kesejahteraan Guru & Dosen Dijamin

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, untuk menjamin kesejahteraan tenaga pengajar, khususnya guru dan dosen.

Hal ini merupakan reaksi atas upaya Omnibus Law yang ditempuh Kemendikbudristek, ihwal penggabungan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2022, Undang-Undang Guru dan Dosen 2005, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2013.

"Banyak yang mengkhawatirkan bakal mereduksi kesejahteraan para guru dan dosen. Mas Menteri jangan coba-coba khianati guru dan dosen," ujar Juru bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada *Rakyat Merdeka*, belum lama ini.

Aktivis pendidikan ini menganalisa, rencana itu berpotensi menghilangkan ayat yang sudah ada. Yaitu, tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG) seperti tertuang di dalam RUU Sisdiknas versi Agustus 2022.

Oleh karena itu, pasca ditolaknya RUU Sisdiknas masuk dalam agenda Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 oleh DPR, PSI minta Kemendikbudristek memastikan jaminan kesejahteraan guru dan dosen da-

lam perbaikan RUU Sisdiknas ke depan.

Menurut Furqan, guru dan dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. "Bagaimana mungkin, guru dan dosen dituntut profesional jika kesejahteraannya terabaikan" tegasnya.

Mantan aktivis 98 ini mengatakan, selama ini, tidak sedikit guru akhirnya terpaksa mencari sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup. Akibatnya, pengajar tersebut tidak bisa fokus mengajar. Kualitas belajar mengajar menjadi menurun.

Apalagi, tugas mengajar tidak hanya dilakukan di kelas, di luar kelas guru-guru harus memeriksa tugas-tugas yang dibuat siswa dan tidak sedikit juga guru yang terlibat dalam urusan-urusan administrasi sekolah, sementara gaji mereka hanya dihitung dari jumlah jam mengajar di kelas. "Belum lagi masih banyak guru yang statusnya masih honorer dan belum tersertifikasi" ungkapnya.

Dia berharap, Kemendikbudristek mengakomodir aspirasi para guru dan dosen. Di mana, sejumlah guru lantang menyuarakan ini. Termasuk, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyambangi Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/9). ■ BSH